

# AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA



Tim Penulis:

Sri Adella Fitri | Hanif Pangestu | Kurniatul Hasanah  
Nisa Fitriana | Jumaidil Hijjah Febri | Michel Purnanda  
Lara Putri Berliana | Mukhlis Arsyad  
Ananda Addryan Pratama | Eva Eka Susanti  
Gio Elfandi | Aldi Miftahul Huda | Merisa Waldiana  
M. Fadillah Tanjung | Mesi Reski | Miska Mufidah Wati

Editor: Muhamad Rizal Kurnia

# **AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

**Sri Adella Fitri  
Hanif Pangestu  
Kurniatul Hasanah  
Nisa Fitriana  
Jumaidil Hijjah Febri  
Michel Purnanda  
Lara Putri Berliana  
Mukhlis Arsyad  
Ananda Addryan Pratama  
Eva Eka Susanti  
Gio Elfandi  
Aldi Miftahul Huda  
Merisa Waldiana  
M. Fadillah Tanjung  
Mesi Reski  
Miska Mufidah Wati**

# AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

## Penulis:

Sri Adella Fitri  
Hanif Pangestu  
Kurniatul Hasanah  
Nisa Fitriana  
Jumaidil Hijjah Febri  
Michel Purnanda  
Lara Putri Berliana  
Mukhlis Arsyad  
Ananda Addryan Pratama  
Eva Eka Susanti  
Gio Elfandi  
Aldi Miftahul Huda  
Merisa Waldiana  
M. Fadillah Tanjung  
Mesi Reski  
Miska Mufidah Wati

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E.**  
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**  
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**  
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**  
Halaman : **xi, 192**  
QRSBN : **62-0115-00440-6**  
Terbit Pada : **Juli 2023**  
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten  
Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)  
Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kami kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat atas iman, nikmat atas Islam, nikmat Kesehatan yang diberikan, nikmat kelapangan waktu dan kesempatan berharga serta berbagai nikmat lainnya yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibalas. Shalawat dan salam selalu dihaturkan dan turunkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Beliau adalah sosok figur tauladan yang tidak pernah habis keunggulan pribadinya untuk diselami, baik dari semua sikap, semua sifat dan semua praktik dalam keseharian beliau. Beliau adalah sosok sempurna yang tidak bisa tergantikan sampai akhir zaman. Dari beliau kita mendapatkan petunjuk indah Islam dan nikmatnya iman, untuk Beliau kita berdoa bersama semoga kita mendapatkan syafaatnya di Hari Kiamat nanti.

Alhamdulillah atas terselesaikannya Buku “Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” yang berhasil ditulis bersama-sama oleh mahasiswa program studi Akuntansi Syariah Angkatan 2020 dalam masa perkuliahan Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung terbitnya buku ini, terutama keluarga yang memberikan dukungan penuh, Ibu, suami, anak-anak dan saudara-saudara. Para sahabat dan rekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Perkembangan akuntansi pada organisasi yang berorientasi laba akhirnya juga menular pada organisasi nonprofit. Pada awal akuntansi dikembangkan disadari peran akuntansi yang sangat penting dalam upaya sebagai jembatan yang ideal dalam komunikasi yang dibangun antara pemberi/pemilik sumber daya dengan pengendali/pengelola sumber daya. Organisasi yang bertujuan bukan untuk mencari laba/non profit seperti halnya pemerintah, memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang diadaptasi dan kemudian disesuaikan dengan karakter organisasinya. Perkembangan pesat ini dibuktikan dengan perhatian yang diberikan pada organisasi pemerintahan, dan BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya. Perhatian ini sejalan dengan tuntutan

transparansi pelaksanaan dan akuntabilitas pengelolaan atas penggunaan dana masyarakat. Pemerintah harus menjamin bahwa pengelolaannya tidak terdapat unsur penyalahgunaan dana dari masyarakat, organisasi pemerintah dituntun dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.

Dalam buku ini terdiri dari 16 (enam belas) bab yaitu: Pendahuluan, Masa Pra Reformasi Akuntansi Pemerintahan, Reformasi Akuntansi Pemerintahan, Pelaksanaan Reformasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pelaksanaan Reformasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Menyongsong Masa Depan Akuntansi Pemerintahan, Konsep Entitas, Basis Akuntansi, *Good Public Governance*, Strategi Penganggaran, Anggaran Strategis, Hubungan APBN/APBD dan Akuntansi Pemerintahan, Bagan Akun Standar, Dana Perimbangan, Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak, Strategi Pembangunan Zona Integritas.

Tujuan dari penulisan Buku ini adalah untuk menambah wawasan mengenai Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, sehingga pembaca buku ini dapat mengenal dan mengetahui lebih banyak dan lebih dalam tentang bagaimana Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Kami menyadari bahwa dalam penulisan. Buku ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan saran yang konstruktif akan sangat kami tunggu dan kami harapkan. Semua ilmu yang kami miliki adalah ilmu yang baik dan hanyalah berasal dari Allah SWT *Rabb al 'alamin*, tidak ada daya dari diri ini yang *al faqir* atasnya. Semua kesalahan dan semua kekeliruan di dalamnya menunjukkan betapa terbatasnya ilmu dan kemampuan yang kami miliki. Semoga Buku ini dapat bermanfaat untuk para pembaca ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam pengetahuan tentang Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.....	2
Tujuan Pemerintah .....	7
Karakteristik Akuntansi Pemerintahan .....	9
Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah .....	9
Kesimpulan .....	10
Daftar Pustaka.....	11
Profil Penulis.....	12
<b>BAB 2 MASA PRA REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN .....</b>	<b>13</b>
Pendahuluan .....	13
<i>Accounting Government</i> .....	14
Reformasi Keuangan Negara.....	16
Tahapan Signifikan Kemajuan Akuntansi Pemerintah.....	17
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan .....	20
Pelaporan Keuangan yang Dihasilkan .....	20
Daftar Pustaka.....	22
Profil Penulis.....	23
<b>BAB 3 REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN .....</b>	<b>24</b>
Reformasi Pemerintahan .....	24
Sejarah Kinerja Reformasi Antar Kabinet.....	27
Standar Akuntansi Pemerintahan.....	34

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan .....	35
Daftar Pustaka.....	36
Profil Penulis .....	37
<b>BAB 4 PELAKSANAAN REFORMASI AKUNTANSI &amp; PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN PUSAT .....</b>	<b>38</b>
Reformasi Akuntansi.....	38
Dampak diterapkannya SAP Basis Akrual .....	39
Pengertian Akuntansi Pemerintah .....	40
Tujuan Akuntansi Pemerintah.....	40
Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	41
Prinsip Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan .....	41
Kendala Informasi Yang Relevan dan Andal.....	43
Pengakuan dan Pengukuran pada Unsur Laporan Keuangan...	44
Standar Akuntansi Pemerintah.....	44
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat .....	45
Teknik Pelaporan Keuangan Pemerintah .....	46
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat .....	46
Daftar Pustaka.....	48
Profil Penulis .....	49
<b>BAB 5 PELAKSANAAN REFORMASI AKUNTANSI &amp; PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>50</b>
Pendahuluan .....	50
Latar Belakang Perubahan Keuangan Daerah .....	51
Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.....	52
Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	52
Peralihan Paradigma Akuntansi Pemerintahan.....	53
Pengakuan Serta Pengukuran Basis Kas Mengarah Basis Akrual .....	53

Penerapan Kaidah Kas Akruar dan Kas Basis Di Berbagai Negara .....	54
Kiat Perubahan Keuangan Daerah.....	54
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dari Berbasis Kas Mengarah Akruar.....	56
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar.....	56
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	59
Opini BPK atas LKBP saat Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar Sejak Diwajibkan untuk Pertama Kali Pada Tahun 2015.....	59
Daftar Pustaka.....	60
Profil Penulis.....	61
<b>BAB 6 MENYONGSONG MASA DEPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN .....</b>	<b>62</b>
Pendahuluan .....	62
Menuju Akuntansi Pemerintahan Yang Baru .....	64
Daftar Pustaka.....	71
PROFIL PENULIS.....	72
<b>BAB 7 KONSEP ENTITAS .....</b>	<b>73</b>
Konsep Entitas .....	73
Entitas Pelaporan Keuangan .....	75
Organisasi Sektor Publik Sebagai Entitas Akuntansi dan Pajak .....	78
Kemandirian Entitas.....	80
Kesinambungan dari Keseluruhan .....	80
Keterukuran Dalam Satuan Moneter (Pengukuran Moneter) ..	81
Daftar Pustaka.....	82
Profil Penulis.....	83

<b>BAB 8 BASIS AKUNTANSI.....</b>	<b>84</b>
Penerapan Basis Akuntansi .....	84
Basis Akuntansi.....	84
Daftar Pustaka.....	93
Profil Penulis .....	94
<b>BAB 9 GOOD PUBLIC GOVERNANCE .....</b>	<b>95</b>
Pendahuluan .....	95
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Public Governance</i> ) .....	96
Asas <i>Good Public Governance</i> .....	99
Aktualisasi <i>Good Public Governance</i> Dalam Penyelenggara Negara .....	100
Daftar Pustaka.....	107
Profil Penulis .....	108
<b>BAB 10 STRATEGI PENGANGGARAN .....</b>	<b>109</b>
Deskripsi Penganggaran.....	109
Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan keuangan Daerah.....	112
Fungsi Penganggaran.....	114
Penyusunan Anggaran.....	116
Asas Pengelolaan Anggaran atau Keuangan Publik .....	117
Pengelolaan Anggaran.....	118
Daftar Pustaka.....	121
Profil Penulis .....	122
<b>BAB 11 RENCANA STRATEGIS.....</b>	<b>123</b>
Rencana Strategis .....	123
Fungsi dan Substansi Rencana Strategis .....	124
Manfaat Rencana Strategis Pemerintah.....	125
Konsep Makna Keberhasilan Rencana Strategis.....	126

Analisis SWOT .....	127
Peranan Perencanaan .....	128
Jenis Perencanaan .....	129
Kedudukan Perencanaan Penting Dalam Organisasi .....	130
Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.....	131
Manfaat Perencanaan dan Hubungannya dengan Fungsi-fungsi Manajemen Lainnya .....	132
Daftar Pustaka.....	133
Profil Penulis.....	134
<b>BAB 12 HUBUNGAN APBN, APBD, &amp; AKUNTANSI PEMERINTAHAN</b> .....	<b>135</b>
Pendahuluan .....	135
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	136
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	139
Akuntansi Pemerintahan .....	141
Hubungan APBN, APBD, dan Akuntansi Pemerintahan.....	144
Daftar Pustaka.....	145
Profil Penulis.....	146
<b>BAB 13 BAGAN AKUN STANDAR .....</b>	<b>147</b>
Bagan Akun Standar .....	147
Tata Kelola Bagan Akun Standar .....	148
Klasifikasi Bagan Akun Standar .....	148
Klasifikasi Selain Akun .....	150
Kerangka Segmen Akun.....	155
Penggunaan Bagan Akun dalam Perencanaan Anggaran.....	156
Daftar Pustaka.....	158
Profil Penulis.....	159

<b>BAB 14 DANA PERIMBANGAN.....</b>	<b>160</b>
Pengertian Dana Perimbangan .....	160
Jenis-Jenis Dana Perimbangan.....	161
Prinsip Dana yang Menyeimbangkan.....	167
Kerangka Kebijakan Dana untuk Perimbangan .....	168
Daftar Pustaka.....	169
Profil Penulis.....	170
<b>BAB 15 AUDIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.....</b>	<b>171</b>
Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	171
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah jumlah atau besaran dalam angka rupiah dari PNBP yang akan diperkirakan akana diterima pada satu tahun anggaran yang akan datang. Target PNBP mencerminkan rencana kerja dalam pelayanan instansi pemerintah yang disertai pungutan PNBP. ....	172
Penetapan Tarif .....	172
Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran .....	173
Pelaporan.....	176
Penggunaan PNBP .....	178
Tujuan dan Lingkup Audit.....	178
Praktik Pemeriksaan PNBP.....	179
Daftar Pustaka.....	180
Profil Penulis.....	181
<b>BAB 16 STRATEGI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.....</b>	<b>182</b>
Strategi Pembangunan Zona Integritas.....	182
Tahapan Pembangunan Zona Integritas.....	183
Manajemen Perubahan Pendirian Zona Integritas.....	184
Dasar Hukum .....	185
Tahapan Pendirian Zona Integritas .....	186

Pengertian WBK /WBBM .....	187
Strategi Pembangunan Zona Integritas.....	188
Daftar Pustaka.....	191
Profil Penulis.....	192

# BAB 1

## PENDAHULUAN

**Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA.**  
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

### **Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi pada organisasi yang berorientasi laba akhirnya juga menular pada organisasi nonprofit. Pada awal akuntansi dikembangkan disadari peran akuntansi yang sangat penting dalam upaya sebagai jembatan yang ideal dalam komunikasi yang dibangun antara pemberi/pemilik sumber daya dengan pengendali/pengelola sumber daya. Organisasi yang bertujuan bukan untuk mencari laba/non profit seperti halnya pemerintah, memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang diadaptasi dan kemudian disesuaikan dengan karakter organisasinya.

Akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 2005, melalui Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2005 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Periode Sekaran ini Akuntansi Pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan baru yaitu akuntansi pemerintah dengan basis akrual. Perkembangan ini tidak terlepas atas di adaptasinya *International Public Sector Accounting Standard* yang telah dirujuk oleh banyak negara dengan mengacu pada basis akrual dalam akuntansinya.

Perkembangan pesat ini dibuktikan dengan perhatian yang diberikan pada organisasi pemerintahan, dan BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya. Perhatian ini sejalan dengan tuntutan transparansi pelaksanaan dan akuntabilitas pengelolaan atas penggunaan dana masyarakat. Pemerintah harus menjamin bahwa pengelolaannya tidak terdapat unsur penyalahgunaan dana dari masyarakat, organisasi pemerintah dituntun dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Andy P Hamzah, Nur Aisyah Kustiani . 2014. *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Nuramalia Hasanah, Achmad Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor:In Media
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Wardani, Pramita Sukma. 2020. *Akuntansi Pemerintahan*. Banyuwangi

### PROFIL PENULIS



#### **Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA.**

Ketertarikan penulis mendalami akuntansi pemerintahan dimulai pada tahun 2008 silam. Hal ini disebabkan karena penulis melanjutkan pendidikan ke Strata 2 dengan memilih keilmuan pada bidang Akuntansi Sektor Publik dan Pemerintahan. Penulis memiliki keilmuan dibidang Akuntansi, melalui pendidikan formal S1 pada jurusan Akuntansi di Universitas Andalas dan S2 pada Program Pascasarjana, program studi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Andalas. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang ilmu tersebut, dan melakukan berbagai pengabdian di bidang ilmu akuntansi. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian Agama. Selain meneliti dan melakukan pengabdian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [sriadellafitri1234@gmail.com](mailto:sriadellafitri1234@gmail.com)

# BAB 2

## MASA PRA REFORMASI

### AKUNTANSI PEMERINTAHAN

**Hanif Pangestu**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

#### **Pendahuluan**

Perubahan besar dalam pembukuan pemerintah Indonesia disebabkan oleh reformasi yang telah dilaksanakan di berbagai bidang sejak tahun 1998. Pengesahan berbagai undang-undang dan peraturan yang ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara menandai perubahan yang signifikan. Bahasa dan uang Belanda terus digunakan untuk jenis tanggung jawab keuangan ini, pertumbuhan akuntan publik di Indonesia sangat terbantu oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melahirkan undang-undang tentang keuangan negara ini.

Sebelum masa reformasi, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 5 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 5 dan 6, serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (MAKUDA) tahun 1981 menjadi landasan formal penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Tolok ukur reformasi pengelolaan keuangan negara kemudian mulai diberlakukan setelah masa reformasi. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pembukuan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, khususnya Pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Membandingkan Hasil Catatan Akuntansi**

<b>NO</b>	<b>Akrual</b>	<b>Kas Menuju Akrual</b>
1	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
2	Neraca	Neraca
3	Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan Atas Laporan Keuangan
5	Laporan Operasional	-
6	Laporan Perubahan SAL	-
7	Laporan Perubahan Ekuitas	-

Sumber: PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 (Olahan)

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Fatahar Rizky. (2019). *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Academia.edu.  
[https://www.academia.edu/9948349/AKUNTANSI\\_PEMERINTAH\\_BERBASIS\\_AKRUAL](https://www.academia.edu/9948349/AKUNTANSI_PEMERINTAH_BERBASIS_AKRUAL)
- Priyono, N. (2014). *Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode Sebelum Reformasi Sampai Dengan Pasca-Reformasi - PDF Free Download*. Docplayer.info.  
<https://docplayer.info/30301106-Perkembangan-akuntansi-pemerintahan-di-indonesia-periode-sebelum-reformasi-sampai-dengan-pasca-reformasi.html>
- Suryanto Suryanto. (2018, December 31). *memperbaharui prosedur seleksi Pemerintahan Indonesia*. ResearchGate; Universitas Komputer Indonesia.  
[https://www.researchgate.net/publication/332969363 Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/332969363_Tinjauan_Atas_Reformasi_Akuntansi_Pemerintahan_Di_Indonesia)

## PROFIL PENULIS



### **Hanif Pangestu**

Nama lengkap penulis Hanif Pangestu biasa di panggil Hanif oleh orang-orang disekitar, lahir di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kota Batusangkar, pada 29 Mei 2002. Pendidikan penulis sebagian besar ditempuh di Sumatera Barat, dari pasangan orang tua yang bernama Tri Karyadi dan Ida Susandra. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, memiliki adik bernama Lathifah Katrid. Penulis masuk sekolah pertama kali pada tahun 2008 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 22 Balijanggo, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, dan lulus pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Batusangkar, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, hingga lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batusangkar. Kemudian Hingga Lulus pada tahun 2020, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Kota Batusangkar yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar melalui jalur Ujian Masuk PTKIN (UM-PTKIN) masuk perguruan tinggi negeri dan mengambil program studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Penulis sekarang duduk di semester 6.

Email Penulis:

[hanifpangestu4@gmail.com](mailto:hanifpangestu4@gmail.com)

[sultanbangkok96@gmail.com](mailto:sultanbangkok96@gmail.com)

# BAB 3

## REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

**Kurniatul Hasanah**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Reformasi Pemerintahan**

Administrasi Pemerintahan atau disebut juga dengan *government administration* merupakan ihwal pemerintahan dalam pengelolaan negara. Agenda reformasi dari berbagai negara di dunia mengalami kegagalan disebabkan oleh iklim demokrasi dan iklim politik yang sangat buruk. Hal ini dikarenakan oleh partai-partai besar yang mengutamakan kemenangan dibandingkan dengan moral dan etika, sehingga melahirkan bibit-bibit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada DPR/DPRD (Hoesada, 2020).

Disebutkan didalam Hoesada (2020) bahwa adanya perbaikan, didasari oleh kekuasaan politik dalam bentuk pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dilakukan dengan sengaja atau disebut juga dengan *reformasi administrasi*. Tujuan dilakukannya reformasi adalah untuk mengembangkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pemerintahan. Reformasi administrasi umumnya disebabkan oleh situasi dan kondisi yang memaksa sehingga menyebabkan *rasionalisasi kabinet*.

Rasionalisasi kabinet adalah bentuk perampingan kabinet dengan perampingan pada organisasi eksekutif secara keseluruhan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD yang mana merupakan biaya administrasi pemerintahan, yang menjadi sasaran perumusan ulang pembangunan, sehingga menyebabkan beberapa organisasi pemerintahan menjadi semakin besar. Cita-cita Indonesia

baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Agar pemerintah dapat membuat Sistem Akuntansi Pemerintah yang menggunakan SAP berbasis akrual, PUSAP berperan sebagai panduan. Pemerintah daerah tunduk pada peraturan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP), seperti halnya pemerintah pusat. (Firmansyah, 2015).

### **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 1 tahun 2004 pasal 57 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden No. 84 tahun 2004 membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan KSAP.

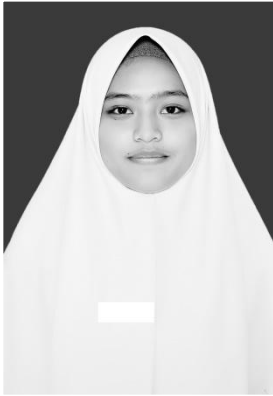
Keputusan Presiden No. 2/2005 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Keputusan Presiden No. 84/2004 tentang KSAP, dan akhirnya digantikan lagi oleh Keputusan Presiden No. 3/2009 tentang KSAP. Sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, KSAP bertugas menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Keuangan dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri Keuangan. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, KSAP melaksanakan tugasnya dengan menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas dan akrual, yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP yang berbasis akrual penuh (Priyono, 2012).

\*\*\*\*\*

### Daftar Pustaka

- Firmansyah, Amrie dkk. (2015). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Hoesada, Jan. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jagakarsa, Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Priyono, Nuwun. (2012). Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Periode Sebelum Reformasi Sampai Dengan Pasca-Reformasi. *Jurnal Akuntansi UTM*, 1(37), 81-93.

## PROFIL PENULIS



### **Kurniatul Hasanah.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu yang berkaitan dengan angka dimulai pada saat penulis masih menduduki bangku sekolah dasar. Hal tersebut membuat penulis memilih Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) pada bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mana didalamnya juga terdapat mata pelajaran Akuntansi Dasar, dan berhasil lulus pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan studi S1 pada program studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, dan saat ini masih berada pada semester 6 .

Penulis merupakan seseorang yang menyukai pengalaman dan hal baru yang menantang dan diluar batas kemampuan penulis, yang sebagian orang berpikir tidak akan mungkin untuk dilakukan. Karena itu saat ini penulis sedang mengeksplorasi pengalaman dan hal baru tersebut dengan membuat suatu karya tulis berupa buku. Dan untuk mewujudkan karir dan kesuksesan penulis setelah lulus nantinya, karya ini adalah salah satu bentuk penunjang karir dan kesuksesan penulis. Selain itu, penulis juga memiliki harapan agar karya tulis berupa buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi banyak pihak, bangsa dan Negara. Dan semoga buku ini dapat berguna sebagai bahan bacaan dan referensi untuk pembaca nantinya.

Email Penulis: [kurniatul.hasanah05@gmail.com](mailto:kurniatul.hasanah05@gmail.com)

# BAB 4

## PELAKSANAAN REFORMASI AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN PUSAT

**Nisa Fitriana**

Universitas Negeri Islam Mahmud Yunus Batusangkar

### **Reformasi Akuntansi**

Reformasi akuntansi adalah perubahan basis akuntansi yang sebelumnya berbasis kas berubah kepada basis akrual. Perubahan basis akuntansi ini dilakukan dengan cara yang bertahap dimulai dengan masa transisi untuk entitas melakukan penyesuaian dengan keadaan masing-masing. Pemerintah menggunakan SAP berbasis akrual yang disusun oleh KSAP yang merupakan sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun SAP yang akan digunakan. penyusunan SAP dilakukan dengan proses secara baku. (Nordawan, Putra and Rahmawati, 2008)

Perubahan dasar akuntansi di setiap Negara berbeda antara suatu Negara dengan Negara lainnya, hal tersebut disebabkan oleh banyak hal diantaranya yaitu:

1. Keadaan sosial dan politik Negara tersebut
2. Dasar akuntansi yang dipakai saat ini.
3. Informasi yang didapat dan dijangkau kurang luas
4. Sumber daya yang disediakan untuk melakukan perubahan basis akuntansi.
5. Jangka waktu untuk perubahan basis menjadi akrual (Loka, Sumadja and Resmi, 2017)

badan atau lembaga Negara harus menyusun laporan keuangan sebagai berikut :

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam laporan ini terlihat bagaimana perbedaan antara anggaran yang dibuat antar dengan realisasi pelaporan anggaran dalam periode akuntansi. Pada laporan tersebut akan terlihat bagaimana ketaatan pemerintah pusat terhadap APBN. Laporan tersebut juga memperlihatkan bagaimana asal, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi oleh pemerintah digunakan selama satu periode akuntansi. Adapun unsur yang disajikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus atau defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa pembiayaan anggaran

### 2. Laporan Posisi Keuangan

laporan ini menjelaskan tentang keadaan atau kondisi keuangan suatu perusahaan atau lembaga terhadap harta, hutang dan modal pada satu periode akuntansi. Adapun akun-akun yang berada dalam laporan posisi keuangan antara lain:

- a. Kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek dan panjang
- h. Ekuitas dana

### 3. Laporan Arus Kas

laporan ini berisi informasi tentang kas baik kas yang diterima ataupun kas yang dikeluarkan dalam satu periode. Metode yang digunakan didalam laporan arus kas terbagi dua yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung

dilakukan pengelompokan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas bruto, sedangkan metode tidak langsung merupakan penyesuaian kas terhadap akun- akun yang berhubungan dengan laporan operasional (Loka, Sumadja dan Resmi, 2017)

#### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan ini menyajikan sebuah informasi yang diharuskan SAP dan pengungkapan penyajian dilakukan secara wajar atas laporan keuangan. Di Kondisi tertentu penyajian akun-akun dalam catatan atas laporan keuangan dapat diubah.

\*\*\*\*\*

#### Daftar Pustaka

- Hoesada, J. (2016) *Bunga Rampai : Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat.*
- Loka, W.P., Sumadja, W.A. and Resmi (2017) *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title, Journal of Chemical Information and Modeling.* Available at: [https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf](https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%202.6%20Smoke.pdf).
- Nordiawan, D., Putra, I.S. and Rahmawati, M. (2008) *Akuntansi Pemerintahan.*

## PROFIL PENULIS



### **Nisa Fitriana**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2019 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan memilih Jurusan akuntansi syariah dan saat ini hampir menyelesaikan perkuliahan. Penulis saat ini sudah berkuliah selama tiga tahun dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk magang dan KKN serta sedang tahap mengajukan judul penelitian. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD 06 Padang Olo, SMP di SMP 2 Sungai Limau dan untuk SMA penulis bersekolah di SMAN 2 Sungai Limau. dan saat ini sedang menempuh pendidikan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis memiliki hobi memasak dan membaca buku. Untuk mengisi waktu luang penulis akan mengisi waktu kosong dengan melakukan hobi. Cita-cita penulis adalah menjadi seorang dosen yang ilmunya sangat bermanfaat buat orang lain.

Email Penulis: [nisafitriana0@gmail.com](mailto:nisafitriana0@gmail.com)

# **BAB 5**

## **PELAKSANAAN REFORMASI AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Jumaidil Hijjah Febri**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Pendahuluan**

Pengelolaan keuangan daerah masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan perundangan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Peraturan-Peraturan yang disusun pada zaman Kolonial Belanda telah sesuai dengan peraturan yang telah ada, pengelolaan keuangan daerah memakai sistem yang sama yaitu dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan negara, termasuk juga bentuk anggarannya yang ditujukan untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan nasional. Bentuk perhitungan disesuaikan dengan bentuk yang digunakan dalam perhitungan negara, seperti anggaran rutin dan anggaran daerah, sama dengan di tingkat pusat yaitu menggunakan basis kas yang secara sah seluruhnya, baik bagi beban maupun bagi pendapatan

Pada bagian pertanggungjawaban uang daerah, setiap tahun Pemerintah Daerah membuat anggaran paling lambat enam bulan setelah berakhir tahun perhitungan ke enam. Anggaran tersebut dilampirkan dengan Nota Perhitungan dan Surat Perhitungan Kas Anggaran dengan menyampaikan selisih uang pada akhir tahun perhitungan. Anggaran tersebut patut diselesaikan dan akan

## **Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemberian opini merupakan hasil akhir BPK terhadap hasil pengamatan laporan keuangan, selain balasan anjuran lain. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah sebagai perwujudan atas tanggung jawab serta transparan pengelola keuangan yang disajikan sesuai dengan SAP. Di deretan pemerintah daerah, penyusunan laporan keuangan mempermudah pengorbanan cepat. Metode pengelolaan internal yang lemah serta ketergantungan SDM yang memahami akuntansi pemerintah merupakan beberapa faktor penyebabnya. Tantangan penyusunan penyusunan bertambah sejalan dengan berbagai kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif yang menyertainya. Dengan hal tersebut, maka laporan keuangan wajib selalu disediakan secara pendanaan. ini tidaklah perkara yang mudah bagi pemerintah daerah.

Seiring dengan upaya peningkatan tanggung jawab dan transparan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama masa reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan, jangkauan opini WTP akan Lembar kerja peserta didik menunjukkan cara peningkatan yang cukup bermakna, dengan pengecualian pada rentang tahun 2004 sampai 2007, terlebih pada 2 tahun pertama implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

### **Opini BPK atas LKBP saat Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Sejak Diwajibkan untuk Pertama Kali Pada Tahun 2015**

Masa 2015 adalah masa pertama kewajiban pelaksanaan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada setiap entitas akuntansi serta pelaporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 terkait Metode Akuntansi Pemerintah. Perubahan basis akuntansi ini dikhawatirkan banyak pihak yang berdampak pada raih opini WTP LKDP dan berpotensi terjun bebas.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

Kartini, d. (n.d.). reformasi akuntansi : mengapa accrual basis lebih baik. p. hal 222.

Meilistya, M. (2018). *akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah indonesia dari masa kemasa*. jakarta pusat: direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan.

## PROFIL PENULIS



### **Jumaidil Hijjah Febri**

Nama lengkap Jumaidil Hijjah Febri, panggilan Febri. Lahir di daratan Merantih, pada tanggal 22 Februari 2002, anak dari buah kasih Ayah Donni. S dan Ibu Jasni. Penulis adalah anak ke-2 dari 4 bersaudara. Pendidikan formal yaitu mulai dari SDN 48 Daratan Merantih lulus tahun 2008, lanjut ke SMPN 3 Lengayang lulus tahun 2017.

Selanjutnya ke Madrasah Aliyah Muhammadiyah Lakitan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Keagamaan dan berhasil lulus pada tahun 2020. Dengan adanya ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2019 silam. Hal tersebut membuat penulis berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. alhamdulillah penulis akhirnya bisa melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yaitu ke Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dengan mengambil jurusan yang berbeda yaitu Program Studi akuntansi Syariah dan sekarang dalam masa pendidikan yang sudah berjalan lebih kurang dua tahun setengah. Sekarang penulis masih dalam kuliah dan masih semester enam.

Penulis memiliki keahlian di bidang keagamaan, kesenian dan fotografi dan untuk mengasah keahlian tersebut penulis pun aktif di beberapa organisasi di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Salah satu organisasi yang penulis ikuti yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan jabatan Anggota bidang keagamaan. Penulis menulis buku ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [jumaidilhijjah545@gmail.com](mailto:jumaidilhijjah545@gmail.com)

# BAB 6

## MENYONGSONG MASA DEPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

**Michel Purnanda**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Pendahuluan**

Permasalahan yang terjadi di perekonomian Indonesia pada saat sekarang ini bisa dilihat dari segi ekonominya yang sangat buruk dari pada Negara lain yang ada dibelahan dunia sejak beberapa periode yang lalu. Permasalahan ekonomi tersebut sangat mengembalikan Negara Indonesia pada awal kemerdekaan yang telah di jajah oleh bangsa lain dan rasanya kembali lagi Negara kita seperti budak dari Negara lain, pertumbuhan ekonomi di Negara kita ini sangat sulit menghadapi tantangan perubahan Mata Uang Rupiah terhadap Mata Uang Asing . sebagai masalah pada masa pemerintahan orde baru yang sudah berkuasa sangat lama akhirnya tumbang juga karena kehendak rakyat tidak terpenuhi akan keinginan nya terjadinya perubahan.perubahan terjadi dengan adanya desakan dari suara rakyat dengan perlahan-lahan dan mengalami kenyataan.

Ada beberapa kemajuan yang pasti adalah kehidupan berpolitik di Negara Indonesia. DPR (dewan perwakilan rakyat) yang mana tugasnya untuk menyuarakan suara rakyat di pemerintahan dan juga MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sudah mulai berani untuk menyuarakan apa yang dirasakan rakyat Indonesia pada saat sekarang ini. Namun, perubahan yang terjadi belum semuanya bisa mengoptimalkan suara rakyat karena terkadang sering terjadi sifat kurang terpuji nya dari berbagai wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. sehingga sering terjadinya kecurigaan

- ketika nantinya menggunakan akuntansi supaya terjadinya pelaporan juga pencatatan yang baik.
- b. Melaksanakan Penelitian dan Menyelidiki Keperluan Pengguna  
Pembaharuan akuntansi pemerintah ini juga membutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi yang berlandaskan kepada aturan yang ada di Indonesia. Dan kemudian sangat diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntansi pemerintahan ini baik dalam maupun luar juga lembaga yang lebih unggul mengenai hal ini.
  - c. Mempermudah Implementasi Akuntansi Pemerintahan  
Dengan implementasi akuntansi pemerintah menggunakan akuntansi menyongsong akrual adalah perubahan yang baru dan banyak terjadi perselisihan ataupun pembicaraan yang berselisih dengan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
  - d. Mendukung Mahasiswa dan Pihak yang lain  
Mahasiswa adalah peran yang sangat penting untuk penerapan akuntansi pemerintah di Indonesia karena di bangku perkuliahan awal dimulainya bagaimana akuntansi Indonesia ini berjalan dengan baik agar penerapan cepat dilaksanakan dan ataupun pihak yang lain juga perlu perannya untuk mensupport keberlangsungan akuntansi pemerintahan.
  - e. Menggunakan Peran Pegawai Akuntansi  
Pegawai akuntansi sangat dibutuhkan untuk menciptakan pembaharuan karena sebagai induk dari perkembangan akuntansi dan pegawai ini lah yang lebih paham dan mengerti soal akuntansi sejatinya dan juga pelatihan yang diajarkan lebih professional mudah dipahami dan dimengerti. Dengan kata lain akuntansi pemerintahan di Indonesia ini sangat butuh orang-orang yang paham akuntansi.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Banker, Rajiv D, William W. Cooper, dan Gordon Potter. *A Perspective Research in Governmental Accounting*. The Accounting Review July 1992: 496-510.
- Barret, pat. *Financial Management in the Public Sector-How Accrual Accounting and Budgeting Enhances Governance and Accountability*. Address to the Challenge of Change Driving Governance and Accountability, CPA Forum, Singapore, 2004.
- Deloitte public sector paper. *Mastering the transformation: new public Management, accrual Accounting, and Budgeting* (internet file, last updated november 2004)
- Fredikson, H. George. *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass Publishers, 1997.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Laporan Tahunan 2004*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Draf Kerangka Konseptual dan Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pope, Jeremy. *Pengembangan Sistem Integritas Nasional*.

## PROFIL PENULIS



### **Michel Purnanda**

“Halo! Nama lengkap Michel Purnanda. Sering di sapa Mikel. Dulu, saya bersekolah di SD Negeri 24 Pincuran Gadang, kemudian dilanjutkan di SMPN 2 Rambatan, dan waktu di SMA saya sekolah di SMA N 2 Rambatan dan alhamdulillah pada saat sekarang menjadi seorang mahasiswa di UIN Mahmud

Yunus Batusangkar dan Sekarang masih semester VI dan mulai masuk kuliah tahun 2020. Jurusan kuliah di Uin Mahmud Yunus Batusangkar yaitu Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis sangat tertarik menulis buku tentang Menyongsong Akuntansi Pemerintahan di Indonesia karena penulis berasal dari Jurusan Akuntansi bisa dilihat saja saat sekarang Negara Indonesia masih jauh perkembangan akuntansi pemerintahannya soalnya dari segi pelaporan maupun pencatatan masih ada kekeliruan di dalamnya semoga dengan dibukukan buku ini untuk tempat memahami lebih dalam soal akuntansi pemerintahan tersebut. dan penulis juga sangat berharap agar bisa bermanfaat dan dibaca oleh orang banyak.

# BAB 7

## KONSEP ENTITAS

**Lara Putri Berliana**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Konsep Entitas**

Suwardjono (2005) mengemukakan teori entitas bahwa organisasi dipandang selaku entitas ekonomi dan unit bisnis yang mandiri, bertindak independen dan mengambil posisi mandiri dan memiliki kedudukan tersendiri bagi organisasi dan unit ekonomi investasi menjadi pusatnya. Tahapan dan perspektif akuntansi, berdasarkan sudut pandang ini akuntansi berkaitan melalui bisnis dan bukan dengan pemilik pelaporan keuangan. Unit bisnis adalah pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan adalah instrumen pertanggungjawaban (Satrio M.D., 2016).

Menurut Hendriksen dalam synaga (1994:59) perlunya pendekatan umum entitas adalah bahwasannya pendekatan umum mendefinisikan bidang kepentingan, dengan demikian mempersempit item, fungsi dan sifatnya yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan, dan di samping itu, sifat pendekatan umum juga memperkecil pilihan dari apa yang dimasukkan. Dalam laporan keuangan dan membantu menetapkan metode terbaik untuk menjelaskan informasi tentang masyarakat (Oesman, 2010).

Paton (1962) memperkenalkan konsep entitas, yang menurutnya organisasi dipandang sebagai unit atau unit ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan berstatus dikendalikan oleh pemilik atau entitas lain yang menginvestasikan dananya dalam organisasi terpisah dan entitas ekonomi yang menjadi fokus perhatian dan fokus pemahaman keuangan. Jadi akuntansi menyangkut pelaporan keuangan perusahaan, bukan pemilik. Departemen bisnis adalah pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan adalah instrumen pertanggungjawabannya (Suwardjono, 2005).

## Keterukuran Dalam Satuan Moneter (Pengukuran Moneter)

Laporan keuangan entitas pelapor harus mencerminkan semua aktivitas yang diperkirakan akan dinilai dalam satuan moneter. Hal ini dibutuhkan untuk memungkinkan analisis dan penilaian dalam akuntansi.

Menurut konsep pengeluaran pemerintah dan konsep totalitas, pemilik anggaran adalah yang berhak mendaftarkan dana ketika pengeluaran yang diberikan oleh anggaran menghasilkan ATB, meskipun pemeriksaan dilaksanakan oleh instansi lain. Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang pengalihan kekayaan intelektual teknologi dan hasil penelitian, pengembangan, yaitu universitas atau lembaga R&D menerima dukungan penelitian dari negara. Pemilik hak kekayaan intelektual tidak dapat diotorisasi. Hasil penelitian dan pengembangan menunjukkan bahwa penerima hibah tidak memiliki kendali atas ATB yang dihasilkan, yang merupakan salah satu kriteria penerimaan ATB.

Menurut teori entitas, perusahaan adalah entitas yang terpisah dari pemiliknya. Dari perspektif teori ini, informasi akuntansi lebih berfokus pada entitas bisnis daripada pemilik. Menurut Paton, teori entitas memiliki dua asumsi dasar, bahwa keputusan investasi dan pendanaan adalah independen satu sama lain, dan struktur modal perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Badan usaha memiliki sumber daya (aset) dan harus bertanggung jawab kepada pemiliknya. Bisnis harus memberikan pemilik laporan keuangan tentang manajemen bisnis. Berdasarkan paradigma ini, rumusan dasar akuntansi bisnis adalah aktiva adalah semua kewajiban (*liability*) dan modal (*Stockholder Equity*).

$$\text{Asset} = \text{Liability} + \text{Stockholder Equity}$$

Aset adalah hak entitas, *equity* adalah kewajiban entitas kepada pemiliknya. Teori ini bertujuan pada pendapatan (*income*) dalam bentuk peningkatan pemerataan (kewajiban masyarakat kepada pemilik). Konsep ini disediakan dalam laporan laba rugi, laporan laba ditahan dan neraca.

### Daftar Pustaka

- Apriyanti, H. W. (2018). Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah : Yogyakarta (18).
- Buletin Teknis Standar Akuntansi pemerintahan Nomor 17. Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. (15)
- Dr. Waluyo, M. M. (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta.
- Hasanah, M., Fauzi, a. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Penerbit In Media : Bogor (33-34)
- Hoesada, D. Jan. (2021). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. *jurnal Wahana*. Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta. Vol. 21 (1).
- Oesman, A. W. (2010). Konsep entitas dalam pencatatan akuntansi kredit program pada koperasi dan lembaga keuangan mikro. *Jurnal EKSIS*, 1316-1317.
- Prof. Dr. Afiyah, dkk (2020). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis akrua pada Entitas Akuntansi. jakarta hal.11
- SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) (9-13)
- Satrio, M. D., dkk. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Jombang. *jurnal akuntansi dan keuangan* vol 18 (1)
- Thomson. (2008). *Accounting*.

## PROFIL PENULIS



### **Lara Putri Berliana**

Nama lengkap adalah Lara Putri Berliana. Tempat tanggal lahir di Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar pada 5 Maret 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Nama ayah penulis adalah Warneri dan nama ibu penulis Misdar. Alamat tempat tinggal penulis adalah Jorong Bukik Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pertama kali penulis masuk SDN 53

Ranah Sago yang berganti nama menjadi SDN 43 Tanjung Bonai, kemudian penulis melanjutkan ke MTSN Tanjung Bonai, kemudian penulis masuk ke SMA N 1 Lintau Buo karena penulis senang menulis. Hal ini mendorong penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lintau Buo dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan berhasil lulus pada tahun 2020. Setelah itu, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan sampai sekarang masih disana. Semester 6 program sarjana Akuntansi Syariah tahun 2023. Insha allah dalam satu tahun kedepan penulis akan menyelesaikan gelar sarjana yang bergelarkan S.Akun. Penulis ingin melanjutkan S2 di sebuah Universitas di Pulau Jawa. Dengan tekad dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan mencoba berbagai hal, penulis berhasil menyelesaikan buku ini. Semoga dengan penulisan buku ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Email Penulis: [laraputriberliana@gmail.com](mailto:laraputriberliana@gmail.com)

# BAB 8

## BASIS AKUNTANSI

**Mukhlis Arsyad**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Penerapan Basis Akuntansi**

Perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sangat erat kaitannya dengan bagaimana upaya untuk perbaikan kualitas informasi laporan keuangan, maka dari itu publik lebih mudah memahami laporan keuangan yang dibaca dan dengan luas mengambil manfaat dari laporan keuangan pemerintah yang dibaca. Basis akuntansi berkaitan erat dengan pengakuan dan pengukuran, yaitu kapan suatu transaksi diakui dan juga berapa nilai uang yang akan dicatat (Meillistya, dkk, 2018).

Pada awalnya banyak dari berbagai Negara yang dalam mencatat aktivitas keuangannya di sektor publik hanya menerapkan basis kas termasuk Negara Indonesia, Hal ini dikarenakan bahwa basis kas lebih mudah untuk diterapkan. Dalam akuntansi berbasis kas ini biasanya transaksi ekonominya diakui ketika adanya kas masuk maupun kas keluar. Pada dasarnya akuntansi berbasis kas ini terfokus hanya untuk transaksi yang mempunyai arus kas.

### **Basis Akuntansi**

Secara dasar, pengertian basis akuntansi yaitu suatu prinsip dalam akuntansi yang berguna dalam periode pengukuran dan pengakuan transaksi ekonomi dalam suatu laporan keuangan. Basis akuntansi terdapat beberapa jenis yang sudah lazim digunakan di dalam dunia perakuntansian. Secara umum dalam dunia perakuntansian dikenal ada empat jenis basis akuntansi, yaitu sebagai berikut:

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Bagian-bagian yang tercermin dalam akuntansi yang dimodifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya keuangan.
- 2) Hutang.
- 3) Aset keuangan bersih/kewajiban bersih.
- 4) Pendapatan dan biaya perubahan aktivitas.

Basis akrual yang dimodifikasi ini memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang sumber daya, alokasi sumber daya, dan penggunaan sumber daya keuangan. (Maryani, dkk, 2017 : 26).

### 5. Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accruals*)

Akuntansi akrual merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu akuntansi kas menuju akuntansi akrual. Akuntansi akrual berbasis kas merupakan bentuk kreativitas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan kemungkinan istilah ini hanyalah ada di Indonesia.

Akuntansi akrual berbasis kas secara umum diterapkan sejak tahun 2005 (berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005) hingga tahun 2014 (berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010). Dari segi terminologi, akuntansi akrual berbasis kas pertama kali diperkenalkan pada pengantar PSAP paragraf 11 PP No. 24 tahun 2005. Pernyataan yang menyebutkan akuntansi akrual berbasis kas meliputi:

- a. Lampiran II.01 KK pada paragraf 39 - PP No. 71 Tahun 2010, yang lebih identik dengan KKAP pada paragraf 39 - PP No. 24 Tahun 2005, yaitu:

"Dalam rekening tahunan negara, dasar akuntansi adalah pelaporan kas pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran, dan dasar akuntansi adalah pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca."

- b. Lampiran II.02 paragraf 5 PSAP 01 - PP nomor 71 tahun 2010, yang identik dengan paragraf 39 PSAP 01 - PP nomor 24 tahun 2005, yaitu:

"Dasar perhitungan yang digunakan dalam rekening tahunan negara adalah kas dan berbasis akrual untuk aset, kewajiban,

dan ekuitas saat melaporkan pendapatan, pengeluaran, pendapatan, dan juga pembiayaan." (Muam, 2015: 42).

Akrual adalah suatu prinsip dimana pendapatan dan beban diakui pada saat uang tunai dikeluarkan, sedangkan aset, kewajiban dan modal saham diakui pada saat transaksi atau peristiwa terjadi (akuntansi akrual digunakan).

\*\*\*\*\*

### **Daftar Pustaka**

- Meilistya, M,. (2018). *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- Mu'am, A. (2015). *Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(1), 38-46.
- Rusmana, O., dkk. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

## **PROFIL PENULIS**



### **Mukhlis Arsyad**

Nama lengkap Mukhlis Arsyad, panggilan Mukhlis. Lahir di Tanjung Barulak, 12 Juni 2001, anak dari buah kasih Ayah Yulias dan Ibu Rosda. Bertempat tinggal di jor. Baliak Baringin Kel/Desa Tanjung Barulak Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat. Penulis adalah anak ke-4 dari 5 bersaudara dan juga merupakan anak laki-laki pertama. Pendidikan formal yaitu mulai dari SDN 18 Batipuh lulus tahun 2014, dan dilanjutkan ke MTs.TI Tanjung Barulak lulus tahun 2017, selanjutnya MAS.TI Tanjung Barulak lulus pada tahun 2020. Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai ketika penulis telah menduduki jenjang perkuliahan, yang mana penulis sekarang berkuliah di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Sekarang penulis sedang menempuh jenjang perkuliahan yang masih menduduki semester enam.

Penulis memiliki keahlian dibidang Keagamaan dan Kesenian, untuk mengasah keahlian penulis tersebut, penulis memasuki beberapa organisasi yaitunya seperti OSIS sewaktu di sekolah dulunya dan menjabat sebagai koordinator bidang keagamaan dan juga sekarang penulis memasuki Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dengan jabatan sebagai kepala bidang keagamaan. Sedangkan untuk keahlian penulis di bidang kesenian, penulis memasuki organisasi bidang seni yaitu UKM Seni Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menulis buku ini dengan harapan penulis dapat memberikan kontribusi positif untuk bangsa dan Negara Indonesia yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [mukhlisarsyad126@gmail.com](mailto:mukhlisarsyad126@gmail.com)

# BAB 9

## ***GOOD PUBLIC GOVERNANCE***

**Ananda Addryan Pratama**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Pendahuluan**

Tata kelola pemerintahan yang sangat baik (*good public governance*) adalah suatu keinginan dalam sebuah pemerintahan dari setiap masyarakatnya. Pemerintahan pada setiap daerah saling bekerja sama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam melakukan pekerjaannya dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat pada pemerintahan (Wayan ;2018).

*Good public governance* muncul karena kurangnya efisien kinerja dari pemerintah yang selama ini dipercaya oleh masyarakat sebagai pelaksana urusan pemerintah yang akan mewujudkan suatu tatanan kehidupan negara yang baik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good public governance*. Kehidupan masyarakat yang sejahtera akan menjadi tolak ukur bagi sistem pemerintahan daerah yang dijalankan apakah sudah terlaksana dengan baik dan benar atau belum (Wayan ;2018).

Konsep mengenai pemerintahan dapat diimplementasikan di sektor swasta maupun publik. Pemerintahan juga dikenal sebagai *corporate governance* dan *governance*, pada sektor publik dikenal sebagai *public governance*. Keduanya memiliki peranan yang penting dalam terciptanya aktivitas pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran penting yang dimiliki oleh *governance* dalam kesejahteraan menjadikan *governance* sebagai topik yang sering dibicarakan oleh orang.

Sementara tata pemerintahan berperan dalam pelaksanaan negara yang bebas akan korupsi serta tertuju pada kepentingan umum, serta

- e. Asas Kesetaraan Dan Kewajaran
  - 1) Aturan undang-undang perlu dilakukan oleh seluruh pihak tanpa adanya perbedaan serta ketidakadilan.
  - 2) Dalam melakukan tanggung jawabnya pelaksana yudikatif perlu mendahulukan keseimbangan serta kepentingan bersama.

#### **4. Pelaksana Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksana Dari Fungsi Non Struktural**

- a. Asas Demokrasi
  - 1) Agenda kerja perlu dilakukan dengan sesuai dengan harapan publik dan mengikutsertakan warga negara.
  - 2) Pelaksana negara yang di badan non struktural perlu membawa masyarakat untuk memberikan pandangan yang berhubungan pada penyelenggara aturan undang-undang.
- b. Asas Transparansi
  - 1) Agenda kerja perlu disampaikan dengan terbuka kepada masyarakat serta mudah di akses oleh masyarakat.
  - 2) Agenda kerja harus disampaikan secara meluas pada masyarakat.
- c. Asas Akuntabilitas
  - 1) Pelaksana lembaga non struktural perlu mempunyai uraian tugas serta kinerja yang bisa diukur.
  - 2) Pelaksana lembaga non struktural perlu mempunyai pemikiran yang luas serta menjalankan tugasnya yang setara dengan aturan undang-undang.
  - 3) Pelaksana lembaga non struktural perlu menyusun tanggung jawab atas penerapan kerjanya.
  - 4) Pelaksana badan non struktural tidak boleh mengambil pemberian dalam bentuk apa saja.
  - 5) Penyelenggara tugas serta tanggung jawab pelaksana lembaga non struktural perlu diukur oleh pihak yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan aturan telah ditetapkan.

- 6) Pejabat lembaga non struktural harus membuat surat pernyataan tidak memberi atau menerima sesuatu dari pihak mana saja.
- d. Asas Budaya Hukum
- 1) Aturan undang-undang diselenggarakan pada dasar asas hukum supaya penegak hukum dapat menjalankannya secara adil serta benar.
  - 2) Pelaksana lembaga non struktural perlu mengetahui bahwa petugas lembaga yang dipimpin nya melakukan aturan undang-undang dengan benar.
  - 3) Masing-masing kesalahan terhadap aturan undang-undang perlu diberikan hukuman sesuai pada aturan undang-undang.
  - 4) Penyelenggara lembaga non struktural perlu melakukan tanggung jawab serta kewajibannya dengan berpengalaman serta menghindar dari praktik KKN.
- e. Asas Kesetaraan Dan Kewajaran
- 1) Aturan undang-undang serta bantuan umum perlu dilakukan oleh seluruh pihak tanpa adanya perbedaan serta ketidakadilan.
  - 2) Bantuan umum perlu dilakukan dengan bertanggungjawab.
  - 3) setiap melakukan tanggung jawabnya pelaksana lembaga non struktural perlu mementingkan kepentingan bersama.

\*\*\*\*\*

## **Daftar Pustaka**

- D,dkk . (2008). *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- Nofyanti. (2015). *Public sector Governance Pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru.
- Sayidah. (2016). Makna *Corporate Governance* Di Sektor Publik.
- Zulfikar. (n.d.). Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

## PROFIL PENULIS



### **Ananda Addryan Pratama**

Dilahirkan di Jakarta 12 februari 2002 dari buah kasih ayah Nafriadi Tanjung dan Bunda Yanti Sofia. Ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Pendidikan awalnya mulai dari TK Islam Fikriyah pada 2008, kemudian SDN 01 Talang Ubi tamat tahun 2014, selanjutnya melanjutkan MTs ke Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Tamat Tahun 2017, dan tahun 2020 tamat MA dari pondok pesantren yang sama. Setelah tamat dari pesantren ia melanjutkan pendidikan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada jurusan Akuntansi Syariah hingga saat ini.

Pengalaman yang dimiliki penulis di bidang organisasi yaitu menjabat sebagai bidang keamanan pusat di Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum (OP3RU). Setelah itu, pernah menjadi anggota SAKA Bhayangkara Polres Ogan Ilir. Penulis memiliki Ketertarikan di bidang desain grafis semenjak mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah di bidang Kominfo periode 2022. Adapun karya ilmiah ini perdana bagi penulis, harapan besarnya semoga ini menjadi terobosan bagi penulis untuk selanjutnya.

Email Penulis: [anandaaddryanpratama02@gmail.com](mailto:anandaaddryanpratama02@gmail.com)

# BAB 10

## STRATEGI PENGANGGARAN

**Eva Eka Susanti**

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

### **Deskripsi Penganggaran**

Munandar (1992) memaparkan bahwa, Anggaran adalah sesuatu yang direncanakan secara sistematis, yang mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan yang dilakukan dengan unit kerja moneter dan memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya. (Tambun, 2020 )

Penganggaran (*Budgeting*) merupakan proses yang menghasilkan anggaran karena adanya pekerjaan (*output*), dan juga merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan fungsi anggaran, yaitu kaidah kerja. Alat koordinasi kerja dan alat pengontrolan kerja. (Ervina, Zuhra, & Amani, 2020)

Penganggaran adalah suatu proses penyusunan anggaran keuangan yakni pendapatan dan pembiayaan dari suatu entitas, yang kemudian dialokasikan ke masing – masing departemen untuk fungsi kegiatan tertentu yang ingin diwujudkan. Yang mana dari kegiatan tersebut dilakukan pengelompokkan berdasarkan tanggung jawab dan tugasnya masing – masing dari satu kesatuan entitas tertentu.. (Nurkholis & Khusaini, 2019)

Menurut Nafarin (2000:10), penganggaran (*Budgeting*) adalah proses penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan laba perusahaan.

Dari pengertian diatas penganggaran adalah suatu proses penyusunan anggaran keuangan suatu entitas yang kemudian dialokasikan ke berbagai kegiatan yang dilaksanakan yang dibagi berdasarkan tanggung jawab dan tugas yang dibebankan suatu

yang banyak digunakan di negara-negara berkembang saat ini. Ciri utama dari anggaran ini adalah:

- a. Penyusunan anggaran didasarkan pada pendekatan inkrementalisme.
- b. Struktur dan komposisi anggaran, yaitu baris – item, Ciri lain yang melekat dalam metode penganggaran tradisional :
  - a. kecenderungan konsentrasi
  - b. Spesifikasi
  - c. tahunan
  - d. Gunakan Prinsip Anggaran Induk

Dilihat dari perspektif yang berbeda, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan :

- a. Anggaran tahunan tidak terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang.
  - b. Metode inkremental
  - c. Lebih fokus pada *input* daripada *output*
  - d. dengan partisi kaku
  - e. Proses penganggaran independen untuk biaya berulang
  - f. tahunan
  - g. Sentralisasi penganggaran
  - h. Persetujuan anggaran lambat
  - i. Aliran informasi yang tidak memadai
2. *Era New Public Management (NPM)*, Era manajemen publik baru telah mengilhami upaya untuk mengembangkan pendekatan perencanaan anggaran yang lebih terintegrasi. Pendekatan kelembagaan anggaran yang baru ini cenderung memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a. Luas
  - b. Terintegrasi dan Lintas Sektor
  - c. keputusan yang rasional
  - d. panjang
  - e. Spesifikasi dan prioritas tujuan
  - f. Analisis keseluruhan
  - g. Mengarahkan *Input, Output*, dan Hasil
  - h. Dengan pemantauan kinerja

## Strategi Penganggaran

3. Akuntabilitas, Akuntabilitas secara harfiah dapat diartikan sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas melibatkan fungsi pengawasan, sehingga informasi yang tersedia untuk publik harus dapat diaudit oleh badan pengawas yang berfungsi.
4. *Value For Money*, Metrik publik yang memberikan informasi apakah anggaran yang diterapkan berfungsi seperti yang diharapkan. Mengacu pada penerapan tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
5. Kejujuran dalam pengelolaan publik
6. Transparansi, Adalah Apakah pemerintah terbuka dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah sehingga DPRD dan masyarakat dapat memahami dan memantau kebijakan tersebut.
7. Pengendalian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus selalu dipantau, yaitu membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. (Nurkholis & Khusaini, 2019)

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Amin, F. (2019). *Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam perspektif Teoritis, Normatif Dan Empiris*. Malang: UB Press.
- Astuti, Purba, B., Sriwiyanti, E., Damanik, E. O., Herawati, R. M., Pande, J. S., et al. (2021). *Teori Penganggaran Perusahaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Ervina, N., Zuhra, S., & Amani, T. (2020). *Teori Akuntansi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Anggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Tambun, R. (2020 ). *Penganggaran Perusahaan* . PT Rel Karir Pembelajar.

## PROFIL PENULIS



### **Eva Eka Susanti**

Penulis lahir pada tanggal 29 April 2002 di Sungai Padi Solok selatan. Ketertarikan penulis terhadap dunia akuntansi sudah dimulai sejak 2017 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Solok Selatan dengan memilih Jurusan Akuntansi dan Lembaga Keuangan dan berhasil lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan sekarang dalam masa studi dengan program studi akuntansi syariah. Penulis juga memiliki hobi membaca dan menulis, dan untuk mewujudkan hal itu penulis bergabung dengan grup penulis buku / *Book Chapter* dengan bertemakan akuntansi pemerintah. Dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara terutama bagi penulis sendiri.

Email Penulis : [evaekasusanti2904@gmail.com](mailto:evaekasusanti2904@gmail.com)

# BAB 11

## RENCANA STRATEGIS

**Gio Elfandi**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Rencana Strategis**

Rencana Strategis ialah suatu dokumen penting yang digunakan untuk memastikan maksud, arah, tujuan untuk masa depan yang ingin dicapai organisasi. Dalam rencana strategis ada yang menjadi acuan untuk mendapatkan masalah yang akan dihadapi, mengidentifikasi potensi, dan sumber daya, penyusunan rencana pada kegiatan untuk mewujudkan suatu capaian. Rencana strategis berfokus kepada upaya yang dilakukan sistematis (secara langsung) dilakukan untuk kepentingan bersama dalam menghadapi suatu tantangan yang dapat membawa perubahan bagi suatu instansi.

Dengan adanya rencana strategis semua anggota organisasi berkeinginan serta mewujudkan tujuan dengan memahami kesanggupan serta menentukan strategi khusus menurut pembagian secara menyeluruh terhadap kondisi serta lingkungan yakni kekuatan dari dalam dan dari luar yang cenderung berdampak pada organisasi.

Arti dari sebuah rencana strategis terhadap organisasi, khususnya pada lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pihak-pihak yang terlibat di antara pimpinan pada semua tingkatan, pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, termasuk kepada pemangku kepentingan secara bersama-sama membangun pemahaman bersama rencana strategis.

Rencana strategis harus menyertakan pemegang kepentingan untuk memastikan keakuratan sudut pandang secara keseluruhan terhadap konflik yang ditemui, pendapat dan penguraian yang luas secara menyeluruh terhadap pembuatan strategis, memantau

## Rencana Strategis

pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses dan usaha untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi dan mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan dalam mencapai tujuannya.

Perencanaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yaitu faktor internal yang meliputi: rencana strategis, anggaran, perluasan bisnis dan aktivitas baru, desain tugas organisasi dan penugasan kerja, manajemen dan sistem informasi organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem pemasaran dan sistem manajemen implementasi, sedangkan faktor eksternal adalah: keadaan ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan pesaing.

### **Manfaat Perencanaan dan Hubungannya dengan Fungsi-fungsi Manajemen Lainnya**

Perencanaan ialah pedoman untuk fungsi-fungsi manajemen lainnya (Fuad, 2021).

Perencanaan memiliki fungsi antara lain:

1. Bantu dan selaraskan diri Anda dengan perubahan lingkungan.
2. Memberikan kemudahan dalam menyelaraskan individu atau kelompok dalam organisasi.
3. Memusatkan perhatian pada tujuan organisasi.
4. Membatasi pekerjaan yang tidak jelas.
5. Menghemat waktu dan uang dalam mencapai tujuan.
6. Membantu dalam kegiatan pengawasan. Perencanaan mempunyai arti penting bagi fungsi manajemen lainnya karena dapat dijadikan dasar atau pedoman bagi manfaat manajemen lainnya.
  - a. Hubungan antara perencanaan dan analisis pekerjaan adalah untuk membandingkan keterampilan aktual karyawan dalam organisasi
  - b. Perencanaan hubungan dengan penarikan tenaga kerja. Tujuan tindakan telah disepakati dan ditentukan dalam rencana sumber daya manusia. Hubungan perencanaan dengan seleksi. Tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi dengan menguraikan jumlah dan tipe karyawan yang diperlukan.

- c. Hubungan antara perencanaan dan perencanaan karier. Tujuannya adalah untuk menyediakan karyawan dengan keinginan yang masuk akal untuk kesempatan untuk kemajuan.
- d. Hubungan antara perencanaan dan penggantian. Tujuannya agar daya tarik tenaga kerja dari luar dapat dikurangi.
- e. Hubungan antara perencanaan dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan dari anggota tenaga kerja yang ada.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Fakhrurrazi, F. (2021) 'Konsep Berpikir Sistemik Dalam Penyusunan Rencana Strategis', *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 6(1), pp. 13-24. Available at: <https://doi.org/10.15575/isema.v6i1.9406>.
- Fuad (2021) 'Perencanaan Strategis Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia', *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(02), pp. 104-105. Available at: <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/jmb/article/view/1208>.
- Rusniati and Haq, A. (2014) 'Perencanaan Strategis dalam Perspektif Organisasi', *Intekna*, 14(2), pp. 102-209. Available at: <https://ejournal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/view/178>.
- Warlizasusi, J. (2018) 'Analisis Perencanaan Strategis, Rencana Strategis dan Manajemen Strategis STAIN Curup 2015-2019', *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 2(2), p. 155. Available at: <https://doi.org/10.29240/jsmp.v2i2.664>.

## PROFIL PENULIS



### **Gio Elfandi**

Nama yang diberikan oleh orang tua dilahirkan di Ujung Air, 27 Maret 2001 dari buah hati Ayah Syamsuardi dan ibu Endriani. Ia merupakan anak pertama dari 4 orang bersaudara. Pendidikan awalnya SDN 26 Padang Tae pada tahun 2007 dan tamatnya pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Sutera mulai tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016, dan tahun 2016 masuk ke SMAN 2 Lengayang. Setelah tamat dari SMAN 2 Lengayang kabupaten Pesisir Selatan tidak langsung melanjutkan pendidikan dengan memilih untuk menganggur satu tahun dikarenakan perekonomian keluarga. Selama menganggur satu tahun mengajar mengaji di TPQ Haq dan TPQ pondok Surau Iqra' ujung Air. Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2019. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke perguruan tinggi Islam negeri pada jalur UM-PTKIN dan alhamdulillah diterima di salah satu perguruan tinggi Islam negeri yakni di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar awal masuk pada tahun 2020 setelah penantian selama satu tahun, dengan memilih Program Studi Akuntansi Syariah.

Penulis memiliki kepekaan di bidang pendidikan, keagamaan dan seni musik tradisional. Dan untuk mewujudkan karier sebagai tenaga pengajar di TPQ penulis pun aktif pada organisasi kampus yakni pada lembaga keorganisasian yakni sebagai staf ahli SEMA Fakultas pada tahun 2021, kemudian ikut bergabung pada UKM KSEI At-Tahiyah pada tahun 2021, kemudian masuk HMJ pada tahun 2022 dengan jabatan kabid keagamaan, setelah itu masuk ke UKK Menwa pada tahun 2022 dan alhamdulillah diamanahkan sebagai KASIOP dan selanjutnya yang terakhir di DEMA universitas dengan jabatan yang diamanahkan sebagai anggota pada bidang Sosmas. Adapun karya ilmiah ini perdana penulis bagi penulis, harapan besarnya semoga ini menjadi terobosan bagi penulis untuk selanjutnya.

Email Penulis: [gioelfandi272001@gmail.com](mailto:gioelfandi272001@gmail.com)

# BAB 12

## HUBUNGAN APBN, APBD, & AKUNTANSI PEMERINTAHAN

**Aldi Miftahul Huda**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Pendahuluan**

Di Indonesia akuntansi pemerintahan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini dapat ditandai dengan adanya perhatian akuntansi pemerintahan terhadap lembaga pemerintahan yang memerlukan sektor pemerintahan dalam beroperasi. Seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lembaga pemerintahan lainnya. Pada keadaan tersebut, terdapat adanya tuntutan kejelasan pada akuntansi sektor publik atas pendanaan yang telah dikendalikan oleh suatu lembaga. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir supaya tidak terdapat penyalahgunaan dana dan juga mengetahui hubungan akuntansi pemerintahan dengan lembaga daerah terutama antara hubungan APBN, APBD dan Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah suatu bagian dari akuntansi berhubungan pada lembaga pemerintah dengan tujuan untuk tidak menghasilkan keuntungan. Akuntansi pemerintahan yaitu sebuah kegiatan yang memerlukan bantuan jasa untuk dapat memperoleh laporan keuangan yang sesuai dengan proses yang telah ditetapkan.

Anggaran negara atau daerah merupakan suatu pencatatan atau pembahasan yang luas berkaitan dengan pemasukkan dan pengeluaran negara atau daerah dengan tempo waktu yang ditentukan. Anggaran ini bisa dikerjakan pada waktu yang ditentukan contohnya pada tempo waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan

keuangan pemerintahan yang berhubungan pada laporan keuangan pemerintahan pusat serta laporan keuangan pemerintahan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan pelaporan akuntansi dan audit pemerintahan di Indonesia.

Basis yang dipakai sebagai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. SAP Berbasis Kas

Pada SAP berbasis kas dipakai oleh pemerintahan sebagai penetapan pembukuan, pengeluaran, dan pembiayaan yang telah direncanakan. Dengan SAP berbasis kas ini maka laporan realisasi anggaran yakni pendapatan yang dicatat pada saat kas yang disalurkan kepada rekening kas umum pusat/daerah pada pelaporan.

b. SAP Berbasis Akrua

SAP berbasis akrual ini ditetapkan pada lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah dan juga ditetapkan pula dalam lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Agar terwujudnya SAP berbasis akrual yang baik untuk tercapainya laporan keuangan dalam pemerintahan maka diperlukan kepercayaan diri dari pemerintahan pusat maupun daerah untuk mengelola akuntansi pemerintahan yang baik.

### **Hubungan APBN, APBD, dan Akuntansi Pemerintahan**

Hubungan antara APBN, APBD dan Akuntansi Pemerintahan ini sangat komprehensif, dapat dilihat dari struktur pendapatan dana APBD dan APBN. Dapat dilihat bahwa dari segi pendapatan dananya APBD mendapatkan dana yang bersumber dari pemerintahan pusat yaitu pada pos pendapatan transfer dan dari pemerintahan pusat yang dapat berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Selain itu, pada pendapatan lainnya yang sah juga ada dana dari pemerintahan pusat seperti hibah dari pemerintahan pusat.

Pada Pemakaian APBD juga harus dibicarakan oleh pemerintahan pusat disebabkan pusat tahu sebagian sumber anggaran daerah adalah untuk biaya pendidikan, pembangunan, dan lain-lain. Untuk

mengeluarkan anggaran pendidikan dan pembangunan harus melihat bagaimana pendapatan dana yang diperoleh oleh pemerintahan untuk mencukupi kebutuhan pada pembangunan pada pemerintahan tersebut.

Sedangkan untuk hubungannya pada akuntansi pemerintahan adalah untuk mengatur keuangan/dana yang dibagi untuk pemerintahan pusat maupun daerah dan juga sebagai cara untuk mencari sumber-sumber dana untuk pemberdayaan atau untuk pembangunan dan juga untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Akuntansi pemerintahan dijadikan sebagai tempat untuk pembuatan berkas yang diperlukan oleh negara atau daerah yang telah diatur oleh UU Pasal 23 ayat 5 dimana negara harus menyediakan laporan pertanggungjawaban dalam setiap pengelolaan keuangan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Achmad. (2021). *Modul Memahami APBN dan APBD*. Depok.
- Hasanah, F. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Wardani. (2020). *Akuntansi Pemerintahan*. Banyuwangi.
- Yuesti dkk. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Badung Bali: CV. Noah Aletheia.

## PROFIL PENULIS



### **Aldi Miftahul Huda**

Dilahirkan di Lurah Ampang Pada Tanggal 25 Maret 2001 dari buah kasih ayah Mudasril dan Bunda Mardianis. Ia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Pendidikan awalnya mulai dari TK Islam Talang Dasun pada 2008, selanjutnya SDN Sungai Tarab tamat pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke MTSN 08 Tanah Datar Tamat Tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan ke MAN 2 Tanah Datar tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ia melanjutkan pendidikan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan jurusan Akuntansi Syariah hingga saat ini. Bakat yang penulis memiliki adalah dalam bidang olahraga terutama dalam bidang olahraga sepak takraw dan futsal. Penulis juga memiliki hobi yaitu mendaki gunung dan juga berpetualang di alam bebas. Adapun karya ilmiah ini perdana bagi penulis, harapan besarnya semoga ini menjadi terobosan bagi penulis untuk selanjutnya.

Email Penulis: [aldi34386@gmail.COM](mailto:aldi34386@gmail.COM)

# BAB 13

## BAGAN AKUN STANDAR

**Merisa Waldiana**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Bagan Akun Standar**

Bagan akun standar yaitu kumpulan kode serta pengelompokan yang terkait dengan mekanisme penyusunan transaksi keuangan yang secara terstruktur digunakan bagi pemerintah sebagai panduan untuk perencanaan, penaksiran, implementasi perkiraan, dan pelaporan keuangan pemerintah. Bagan akun standar bisa dipecah menjadi sub rencana, sub aktivitas komponen perkiraan, satuan, unit kegiatan, serta kode anggaran/akun.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Mengenai Keuangan Negara untuk pengamatan bentuk dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah lebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK, 2010).

Penggolongan kerangka Bagan Akun Standar yang mengarah kepada peraturan mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang menjadi panduan bisa dalam akuntansi pemerintah yang berbentuk gambar final. Kerangka Bagan Akun Standar bertujuan untuk mengetahui pedoman umum yang ada pada pencatatan serta perluasan Bagan Akun Standar secara fungsional sehingga Bagan Akun Standar dapat disusun dan dikembangkan dengan mengarah pada kerangka Bagan Akun Standar.

### Tata Kelola Bagan Akun Standar

Tata kelola bagan akun standar memiliki keterkaitan dengan struktur dan perubahan Bagan Akun Standar. Dalam menetapkan dan menyusun tata kelola, masing-masing orang yang memiliki kepentingan dalam perusahaan tersebut akan melakukan pemisahan terhadap fungsi *approval* dan administrator. Fungsi *approval* melakukan *review* dari penambahan akun dari masing-masing klasifikasi yang telah dibuat. Fungsi administrator melakukan proses percobaan terhadap sistem dan proses *updating* bagan akun standar.

Tata kelola bagan akun standar yang mana pelaksanaan implementasi akuntansi berbasis akrual sangat mendukung kemampuan dalam melakukan pembaharuan terhadap akun yang sudah ada.

### Klasifikasi Bagan Akun Standar

Dalam penyusunan BAS pemerintah Indonesia yang dicantumkan dalam Peraturan MenKeu No. 91 Tahun 2007 mengenai Bagan Akun Standar. Klasifikasi anggaran dapat digunakan pada perencanaan, penerapan taksiran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk menjamin penggunaan akun yang semua tahapannya (Keuangan, 2008).

Perubahan basis akuntansi dari kas menjadi akrual membuat perubahan Bagan Akun Standar, terutama dalam hal struktur dan akun-akun dalam penerapan basis akrual. Sesuai seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.5/2007 pada 30 Agustus 2007, terdiri atas klasifikasi lembaga, aplikasi, aktivitas dan keuangan.

Latar belakang yang menyempurnakan perubahan basis akuntansi menjadi bagian dari bentuk akuntansi pemerintah pusat. Atas adanya pergantian dasar akun pada akuntansi membuat dasar akrual, ada peningkatan akun yang terdapat dalam implementasi akuntansi berdasarkan akrual, yaitu; biaya persediaan, biaya penyisihan piutang tak tertagih, dan beban penyusutan. Penyelesaian bagan akun standar hal fundamental bagi penyelesaian dalam akuntansi serta pemberitahuan, akhirnya perlu adanya kerangka

instansi pada kelompok Teknologi informasi harus searah dengan kebijakan pemerintah seperti pelaksanaan anggaran berdasarkan *performance* dan akuntansi berdasarkan aktual

6. Penerapan Bagan Akun Standar tanpa membedakan klasifikasi anggaran dan akuntansi.

**Tabel 13.6. Kodefikasi Segmen Akuntansi Tahun Anggaran 2022**

No Akun	Klasifikasi Akun	Keterangan
521 252	Membeli Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Dipergunakan untuk pencatatan pengadaan peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi.
521 253	Membeli Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel	Dipergunakan untuk pencatatan pengadaan gedung dan bangunan yang nilainya dibawah kapitalisasi
521 254	Membeli Aset Tetap Lainnya ekstrakomptabel	Dipergunakan untuk pencatatan pengadaan aset tetap antara lain seperti hewan dan tanaman hidup.
525 162	Membeli Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel BLU	Dipergunakan untuk pencatatan pengadaan peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi BLU
525 163	Membeli Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel BLU	Dipergunakan untuk pencatatan pengadaan gedung dan bangunan yang nilainya dibawah kapitalisasi BLU
525 164	Membeli Aset Tetap Lainnya Ekstrakomptabel BLU	Dipergunakan untuk mencatat pengadaan aset tetap antara lain seperti hewan dan tanaman hidup BLU
523 125	Membeli Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	Dipergunakan untuk pencatatan belanja bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) yang dipergunakan untuk menunjang operasional sistem dan nomor sistem kementerian pertahanan, TNI, Polri dan kementerian negara lain yang memiliki transaksi yang sama.

Sumber: diolah penulis

\*\*\*\*\*

**Daftar Pustaka**

- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Keuangan, M. (2008). *Menteri keuangan republik indonesia. 2004*, 5-8.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 214 /PMK.05/ 2013. (2013). tentang Bagan Akun Standar. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(127), 1-16.
- Puspita, I., & Iskandar, R. (2021). *Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.

## PROFIL PENULIS



### **Merisa Waldiana**

Penulis lahir di Sungai Dareh pada tanggal 11 Maret 2002, merupakan anak ke-3 dari bapak Zulhamidi dan ibu Yusrida. Penulis pada usia 4,5 tahun sudah mulai mengenal lingkungan sekolah yang mana penulis bersekolah di PAUD Mutiara Hati pada tahun 2006, selanjutnya melanjutkan ke Taman Kanak-kanak pada tahun 2007, setelah SD di SDN 17 Pulau Punjung masuk 2008 dan selesai pada tahun 2014 selanjutnya penulis melanjutkan ke SMPN 3 Pulau Punjung lulus pada tahun 2017 setelah itu penulis masuk ke SMKN 1 Pulau Punjung lulus pada tahun 2020. Setelah lulus dari SMK penulis melanjutkan kuliah di UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Ketertarikan penulis terhadap akuntansi dimulai pada tahun 2017 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pulau Punjung dengan memilih Jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga dan berhasil lulus pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan Insya Allah akan menyelesaikan studi S1 di Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2024 nanti. Penulis berkeinginan untuk bekerja di tempat yang baik dan sesuai dengan bidang kemampuannya

Email Penulis: [merisawaldiana11@gmail.com](mailto:merisawaldiana11@gmail.com)

# BAB 14

## DANA PERIMBANGAN

**M. Fadillah Tanjung**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Pengertian Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan Dalam rangka penunjang penerapan kemenangan penguasa daerah untuk memperoleh arah perluasan kewajiban daerah, khususnya dalam meningkatkan penyajian dan ketenteraman masyarakat, dana perimbangan adalah asal penghasilan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kumpulan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi yang disebut dana perimbangan tidak dapat dialokasikan secara terpisah karena masing-masing jenis pendapatan dimaksudkan untuk mendukung dan untuk memperkuat yang lain. (Bratukusumah & Solihin, 2001)

Dana bagi hasil APBN, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang secara umum dipahami sebagai dana daerah. Pembiayaan perbelanjaan daerah, baik pengeluaran bayar rutin maupun pengeluaran belanja pembangunan, akan berasal dari peraturan perimbangan, atau uang yang disalurkan dari pemerintah pusat ke daerah.

Dana perimbangan yaitu faktor produksi mampu disalurkan ke daerah agar memenuhi kebutuhan keuangannya sebagai bagian dari proses desentralisasi. Untuk menutup defisit anggaran dengan jarak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang disediakan oleh peraturan perimbangan. (Sutedi, 2010)

Transfer nilai uang yang disepakati secara bersama antara federal dan pemerintah lokal adalah apa yang Eeng Ahman definisikan sebagai "dana penyeimbang". Dana yang termasuk dalam Dana Perimbangan adalah:

pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disebut perimbangan keuangan.

Perimbangan keuangan antara pusat dan wilayah Pembagian kewenangan tersebut digunakan untuk melaksanakan kebijakan Artinya, hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diatur pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi dan kebutuhan belanja yang menjadi tanggung jawab daerah dan dapat dibiayai dari sumber-sumber pendapatan yang ada sesuai dengan pembagian kewenangan tersebut di atas bantuan pekerjaan dan kehilangan konsentrasi. (Sadat, 2022)

\*\*\*\*\*

### Daftar Pustaka

- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Yogyakarta: Tunas Gemilang .
- Bratukusumah, D. S., & Solihin, D. (2001). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama .
- Prasetyawan, A., & Gamaputra, G. (2019). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jawa Tengah: Anggota IKAPI No. 181/JTE/2019.
- Sadat, A. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **PROFIL PENULIS**



### **M. Fadillah Tanjung**

Nama lengkap M. Fadillah Tanjung, nama panggilan Fadil, Tempat tanggal lahir Batusangkar, 28 oktober 2002, Anak dari ayah Bahari Tanjung dan ibu Melfawanti. Penulis buku ini adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara. Pendidikan formal yaitu mulai dari SDN No. 100215 persiapan MOSA JULU lulus tahun 2014, lanjut ke SMPN 3 ANGKOLA SELATAN lulus pada tahun 2017, lanjut lagi masuk SMA N 2 SEI KANAN lulus pada tahun 2020. Dengan adanya keterkaitan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2019 silam. Hal tersebut dengan membuat penulis berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah penulis akhirnya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Universitas Mahmud Yunus Batusangkar. Dengan mengambil jurusan yang berbeda jurusan akuntansi syariah dan sekarang dalam masa pendidikan yang sudah berjalan lebih kurang dua tahun setengah. Sekarang penulis masih dalam kuliah dan masih semester enam. Penulis memiliki keahlian dibidang olahraga, olahraga badminton sepak bola, penulis pun aktif organisasi ketika SMA di organisasi OSIS SMA 2 Sei Kanan, salah satu organisasi yang penulis ikuti yaitu di bidang olahraga, karena penulis memiliki keahlian dibidang olahraga maka penulis memilih dibidang olahraga. Penulis menulis buku ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta.

Email Penulis: [mfadillahtanjung28@gmail.com](mailto:mfadillahtanjung28@gmail.com)

# BAB 15

## AUDIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Mesi Reski

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu wujud pendapatan negara yang berpotensi melakukan APBN pada tahun 2005, PNBP ini dalam pendapatan yang sudah dilaksanakan pemerintah negara. Ada pula wujud pendapatan negara di Indonesia, sebab tidak tahu berawal dari pajak. Oleh karena itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak wajib dicatat dengan secara cermat untuk mensupport keberhasilan PNBP serta membenarkan akuntabilitas penerapan APBN. Kemudian wajib berupaya mewujudkannya, bahkan secara bertahap meningkatkannya dari tahun ke tahun supaya PNBP bisa memberikan partisipasi yang lebih besar dalam mensupport pembangunan nasional.

PNBP merupakan sesuatu aspek keuangan negara yang akan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Keuangan selaku badan interogator kepada bagian yang pengaruhi pendapatan negara dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas pencatatan penerimaan negara bukan pajak, Pemerintah menyelenggarakan sistem untuk pencatatan PNBP yaitu Modul Penerimaan Negara. Modul Penerimaan Negara ialah bagian dari sistem pendapatan serta pengeluaran kas negara serta melingkupi metode mulai dari pemungutan, pembayaran, pendataan, registrasi, rekapitulasi hingga dengan pelaporan yang akan dikaitkan dengan penerimaan negara.

3. Dalam realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak akan mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIKS. (sumber: Pedoman audit penerimaan pajak atas belanja pemerintah & PNBP).

Pada unit kerja di lingkungan kementerian atau lembaga atau dinas dan Lembaga, sebagian besar memiliki berbagai macam sumber PNBP. Pemeriksaan PNBP dilakukan terhadap satuan kerja di seluruh kementerian atau lembaga pemerintah non departemen yang memiliki PNBP, khususnya satuan kerja yaitu:

1. Pada Biro Kementerian Keuangan.
2. Direktorat Jenderal pada Kementerian Teknis terkait.
3. Direktorat Perbendaharaan Umum, Kementerian Keuangan.
4. Kantor Keuangan Kementerian Teknis yang terkait,
5. Kantor Lelang, Kantor Informasi dan Hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Penagihan Lelang yang akan diperiksa diarahkan pada kegiatan yang meliputi:
  - a. Peraturan pendukung
  - b. Penentuan
  - c. Pengumpulan & Penyetoran
  - d. Perencanaan
  - e. Administrasi
  - f. Pelaporan dan tanggung jawab.

### **Praktik Pemeriksaan PNBP**

Dalam pembangunan dilakukan pencapaian tujuan negara, yang akan dibiayai dari penerimaan negara yang berasal dari pajak serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terwujud PNBP di Indonesia yang hendak membagikan partisipasi penting kepada pendapatan negeri merupakan PNBP di sektor pertambangan umum.

Sampai saat ini, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menjadi sumber penggerak utama perekonomian nasional. sekaligus dalam kedudukannya sebagai sumber penerimaan negara, pemasok energi, daya Tarik investasi, surplus neraca perdagangan, pemasok bahan baku industri, factor berkuasa pembuatan Indikator Harga Saham Kombinasi (IHGS), pembangunan wilayah serta invensi mata kaitan. Akibat berbentuk pengiriman daya kegiatan ke luar

## Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak

negara serta invensi alun- alun kegiatan di dalam negara. Pada tahun 2008 yang disyaratkan dengan instabilitas harga minyak anom bumi yang amat runcing pada akhir tahun, sektor ESDM mencatat ditaksir realisasi pendapatan negara sebesar Rp346,347 triliun ataupun sebesar 36%. Dari pendapatan sektor ESDM itu, subsektor pertambangan Biasa terdaftar sebesar Rp42, 120 triliun ataupun sebesar 4, 4% yang terdiri dari Pajak Pertambangan Biasa serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertambangan Umum.

\*\*\*\*\*

### Daftar Pustaka

- Pendapatan Negara Bukan Pajak  
<http://ejournal.upi.edu/index.php/BHS/article/download/48/16>]
- Badan Layanan Umum & Penerimaan Negara Bukan Pajak <http://www.kopertis12.or.id/2011/01/18/badan-layanan-umum-blu-penerimaan-negara-bukan-pajak-pnbp.html>]
- Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, <http://www.bpk.go.id/lkpp>, diakses pada 17 November 2016.
- Gay, Grant and Roger Simnet. (2013). *Auditing & Assurance Services in Australia*, 5th Edition. McGrawHill.
- Murwanto. (2007). *Audit Sektor public*. Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Pedoman audit penerimaan pajak atas belanja pemerintah dan PNBP) <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/onten/746/Pedoman-PNBP>
- Paduan pengawasan (PNBP), 2021). [https://emawaspnbp.kemenkeu.go.id/uploads/panduan/202110/panduan\\_pengawasan\\_pnbp\\_final\\_ttd.pdf?download=1](https://emawaspnbp.kemenkeu.go.id/uploads/panduan/202110/panduan_pengawasan_pnbp_final_ttd.pdf?download=1)

## PROFIL PENULIS



### **Mesi Reski**

Mesi dilahirkan di Silungkang, 20 Maret 2000 dari buah kasih ibu Arnis dan ayah Mardiman. ia merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Pendidikan awalnya, dimulai dari SD Negeri 18 Pematang Panjang tamat pada tahun 2015, selanjutnya melanjutkan ke SMP Negeri 13 Sijunjung tamat pada tahun 2018, selanjutnya melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 3

Muaro Bodi dengan memilih jurusan Perbankan Keuangan Mikro (PKM) dan berhasil lulus pada tahun 2020 kemudian melanjutkan pendidikannya di UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada jurusan Akuntansi Syariah. Selain berkuliah ia juga aktif berorganisasi dalam bidang Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah, Dari sisi lain dia aktif juga dalam diantaranya bergerak di bidang UKM Seni UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan juga ia aktif pada bidang Generasi Baru Indonesia (GENBI) sebagai Pengurus di bidang publikasi saat ini.

Email Penulis: [reskimesi6@gmail.com](mailto:reskimesi6@gmail.com)

# BAB 16

## STRATEGI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**Miska Mufidah Wati**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

### **Strategi Pembangunan Zona Integritas**

Zona integritas merupakan rancangan yang diturunkan dari rancangan pulau integritas beberapa tahapan integritas biasanya diperlukan oleh pemerintah ataupun Lembaga non pemerintah untuk membuktikan semangatnya saat mengatasi tindak pidana korupsi. Sejak terbitnya PP No. 81 Tahun 2010 mengenai rancangan utama perubahan Birokrasi pada Tahun 2010 sampai 2025 dengan tiga sasaran utamanya, yakni meningkatkan daya tampung dan akuntabilitas instansi pemerintah yang terhindar dari korupsi. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk percepatan dalam manajemen pergantian tata laksana, pembentukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Pembangunan

Seiring dengan hal itu maka instansi pemerintah mendirikan unit untuk percobaan melaksanakan perubahan birokrasi yang mampu menjadi contoh terhadap unit kerja lainnya, sebagaimana zona integritas dipakai oleh pemerintah ataupun NGO untuk membuktikan semangat dalam pemberantasan serta pencegahan tindak pidana korupsi, bukan rahasia umum lagi jika pelayanan birokrasi di Indonesia harus banyak menjadi relawan dengan praktek korupsi.

Konsekuensi dengan adanya pencatatan pembangunan zona integritas adalah seluruh jaringan yang tergabung dalam pembangunan tersebut untuk dapat benar-benar melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Tujuan dari penulisan

## Strategi Pembangunan Zona Integritas

- a. ALASCALANG (aplikasi layanan pasca lelang)  
Merupakan pemakai fasilitas paling utama pemegang lelang mendapatkan lelang semacam kutipan surat lelang, kualitas pembayaran lelang, formulir BPHTB serta verifikasi SSP Dengan alasan memperoleh. Kelapangan penyampaian sesudah lelang yang dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja, ditemukan kejelasan jam layanan yang dapat diawasi setiap waktunya.
- b. SIBELANG (sistem informasi bendahara dan pejabat lelang)  
Merupakan aplikasi melancarkan petugas bendahara dan pejabat lelang dalam mencepatkan layanan. SIBELANG sudah di evaluasi terhadap selingkup keuangan dan memperoleh kemenangan dalam TOP ke 12 pertandingan inovasi kementerian keuangan. mekanisme bisnis lelang yang awalnya melalui buku petunjuk hingga menjadi komputerisasi yang mempersingkat waktu penyelesaian dan meminimalkan resiko pengamputasian.
- c. MUTIARA (monitoring pengurusan piutang negara)  
Adalah suatu inovasi yang berperan untuk melancarkan MUTIARA dalam memberi laporan kepada yang berhutang terkait sisi hutang yang masih harus di lunaskan.
- d. DIFENSER (dinding informasi satuan kerja dan stakeholder)  
Monitoring dunia kerja, Satuan kerja dan pengolahan Badan Milik Negara memuat informasi tentang identitas satuan kerja, kapasitas dan nilai Badan Milik Negara, pemanfaatannya, penentuan status pemilik Badan Milik Negara, serta tempat penyimpanan barang jaminan piutang negara. Monitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk memastikan program atau rencana kerja yang sudah dilakukan dengan alurnya. Kegiatan. Memantau serta evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan agar unit kerja bisa melihat pembangunan program yang telah di laksanakan dan secepatnya menindak lanjut jika terjadi rintangan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan.
- e. Manajemen media  
Sangat strategi dalam menyebar informasi, termasuk dalam memberi informasi kepada masyarakat. Pengguna media sosial

merupakan tempat yang paling tepat untuk menyampaikan informasi secara cepat. KPKNL sudah membuat tim sebagai pengelola media sosial dan informasi kedinasan dengan rancangan kerja dengan target yang pasti terkait kontes yang akan di sosialisasi kan. KPKNL membuat kontes postingan instagram setiap waktu.

\*\*\*\*\*

### Daftar Pustaka

Susanti, Linda(2021). *Pembangunan zona integritas KPKNL Bekasi : suatu proses, tantangan dan strategi menuju ZI WBK/WBBM..* jakarta pusat: direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan.

## PROFIL PENULIS



### **Miska Mufida Wati**

Nama lengkap Miska Mufida Wati. Panggilan Miska, Penulis adalah putri dari bapak Syahril dan ibuk zulimar. Penulis lahir di Andalas pada tanggal 26 Agustus 1998. penulis anak ke-3 dari 4 bersaudara. Pendidikan formal yaitu dimulai TK, SD, SMP, dan MAN. Dengan adanya ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2020. dengan hal itu, penulis berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk menambah ilmu. Alhamdulillah akhirnya penulis bisa menduduki bangku kuliah yaitu di kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah. Sekarang penulis sedang menjalani perkuliahan dan sekarang masih semester enam. Pada saat MAN penulis ambil jurusan ilmu pengetahuan keagamaan. Namun di saat kuliah ambil jurusan yang berbeda. Penulis menulis buku ini dengan harapan semoga dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis : [miskamufi42@gmail.com](mailto:miskamufi42@gmail.com)

# AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Perkembangan akuntansi pada organisasi yang berorientasi laba akhirnya juga menular pada organisasi nonprofit. Pada awal akuntansi dikembangkan disadari peran akuntansi yang sangat penting dalam upaya sebagai jembatan yang ideal dalam komunikasi yang dibangun antara pemberi/pemilik sumber daya dengan pengendali/pengelola sumber daya. Organisasi yang bertujuan bukan untuk mencari laba/non profit seperti halnya pemerintah, memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang diadaptasi dan kemudian disesuaikan dengan karakter organisasinya. Perkembangan pesat ini dibuktikan dengan perhatian yang diberikan pada organisasi pemerintahan, dan BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya. Perhatian ini sejalan dengan tuntutan transparansi pelaksanaan dan akuntabilitas pengelolaan atas penggunaan dana masyarakat. Pemerintah harus menjamin bahwa pengelolaannya tidak terdapat unsur penyalahgunaan dana dari masyarakat, organisasi pemerintah dituntun dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.

Dalam buku ini terdiri dari 16 (enam belas) bab yaitu: Pendahuluan, Masa Pra Reformasi Akuntansi Pemerintahan, Reformasi Akuntansi Pemerintahan, Pelaksanaan Reformasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pelaksanaan Reformasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Menyongsong Masa Depan Akuntansi Pemerintahan, Konsep Entitas, Basis Akuntansi, *Good Public Governance*, Strategi Penganggaran, Anggaran Strategis, Hubungan APBN/APBD dan Akuntansi Pemerintahan, Bagan Akun Standar, Dana Perimbangan, Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak, Strategi Pembangunan Zona Integritas.

